BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat merupakan fenomena yang terjadi saat ini. Penggunaan peralatan elektronik untuk mengolah datamenjadi informasi semakin banyak diterapkan di semua lapisan masyarakat di indonesia. Dengan berkembanganya teknologi Informasi menyebabkan pemerintah lebih meningkatkan implementasi penggunaan teknologi nnformasi pada departemen dan dembaga yang berada dibawah naunganya. Di Negara Indonesia terdapat beberapa departemen dan lembaga yang berada dibawah naungan langsung pemerintah salah satunya adalah Departemen Keuangan. Kondisi keuangan suatu negara memegang peran yang sangat penting dalam sebuah negara. Kegiatan perekonomian pada suatu negara sangat erat kaitanya dengan keuangan dan dapat dikatakan bahwa keuangan merupakan motor penggerak bagi sebuah negara dalam menjalankan roda kehidupan. Pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu negara dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dibutuhkan aparatur dan sistem yang handal dalam menyelesaikan fungsi dan peran yang diberikan sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan berkembangnya teknologi informasi pemerintah mendapatkan kemudahan dalam hal mengelola keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa indonesia.

Seers (1977), mendefinisikan pembangunan sebagai suatu istilah teknis, yang berarti membangkitkan masyarakat di Negara-negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf (literacy rate) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang berada dibawah Departemen Keuangan yang bertugas untuk melaksanakan tugas telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aliran dana APBN yang telah disalurkan pemerintah kepada departemen dan lembaga milik pemerintah.

Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada kantor pusat sebagai laporan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana pembangunan. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinya.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan hasil pengawasan keuangan maka dibutuhkan adanya suatu sistem yang baik untuk mendukung kinerja BPKP dengan tujuan mencapai suatu hasil yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan berguna bagi bangsa indonesia.

Menurut Stanbury (2006:24) Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,melalui suatu media pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan secara periodik.

BPKP adalah lembaga yang memiliki sistem yang membagi pada beberapa divisi/bagian sesuai dengan tugas dan fungsi kerja, salah satunya adalah Bagian Program dan Pelaporan(PROLAP). Bagian PROLAP adalah salah satu dari beberapa bagian yang ada didalam lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. dalam Bagian PROLAP terdapat seorang kepala bagian dan beberapa orang pegawai. Semua elemen yang ada yaitu sistem dan pegawai saling terhubung satu sama lain dengan satu tujuan yaitu untuk menjalankan fungsi utama dari Bagian PROLAP. Pada periode waktu tertentu setiap pegawai di bagian PROLAP akan mendapatkan tugas baik didalam atau diluar kota. Dalam pemberian tugas yang diterima oleh PROLAP terdapat tiga kronologi penugasan yang didapatkan yaitu;

1. Kronologi Pemberian Tugas Dari Kantor Pusat.
2. Kronologi Permohonan Tugas Kepada Kantor Pusat.
3. Kronologi Permintaan Bantuan Dari Departemen Lain.

Dari pelaksanaan tugas yang diterima oleh bagian PROLAP terdapat beberapa landasan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas oleh bagian PROLAP yaitu;

1. Landasan pelaksanaan tugas oleh bagian PROLAP berdasarkan pada kewajiban untuk memeriksa penggunaan anggaran pembelanjaan dan biaya negara(APBN) yang disalurkan oleh pemerintah kepada departemen milik pemerintah disetiap daerah di indonesia .
2. Prosedur pembuatan surat tugas berdasarkan dari dokumen yang berkaitan dengan tugas yang diberikan baik pengajuan dari pusat ke kantor

perwakilan, permintaan dari kantor perwakilan ke pusat atau permintaan dari departemen lain.

Pada penelitian ini, penulis ingin mencoba lebih menyempurnakan sistem informasi penugasan yang berjalan pada Bagian PROLAP dengan menambahkan sebuah sistem dengan tujuan mempermudah dalam proses pengolahan data pelaksanaan tugas. Dengan adanya sistem ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menyajikan informasi penugasan oleh PROLAP secara lebih lengkap dan akurat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun mengusulkan penelitian untuk membangun sebuah aplikasi yang diberi judul ”**Sistem Informasi Penugasan PROLAP Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang cukup penting dimana dalam proses ini dapat menentukan kualitas penelitian itu sendiri. Dan rumusan masalah merupakan penegasan dari apa yang sebenarnya menjadi inti penelitian.

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rencana Kerja Tahunan (RKT) hanya berperan sebagai sistem yang berfungsi untuk memberikan tugas dari kantor pusat ke perwakilan sehingga belum terdapat aplikasi yang berguna untuk menyimpan data pelaksanaan tugas.
2. Proses input data pelaksanaan tugas dilakukan secara manual sehingga tejadi kesulitan dalam backup data.
3. Keakuratan data masih belum terjamin .
4. Masih banyak penggunaan dokumen berupa kertas sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan atau kehilangan dokumen tersebut.

Dengan berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari masalah-masalah yang teridentifikasi masalah diatas maka diperoleh rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Informasi penugasan PROLAP yang berjalan.
2. Bagaimana Perancangan Sistem Informasi penugasan PROLAP.
3. Bagaiman Implementasi Sistem Informasi penugasan PROLAP .
4. Bagaimana Pengujian Sitem Informasi Penugasan PROLAP.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud penulis untuk melakukan penelitian di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem yang berjalandalam mengelola prosedur yang ada salah satunya yaitu prosedur pemberian tugas kepada pegawai .Selain itu penulis juga bermaksud untuk mempelajari fungsi dan tugas pokok dari bagian PROLAP.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sistem Informasi penugasan PROLAP .
2. Untuk membuat Perancangan Sistem Informasi Penugasan PROLAP.
3. Untuk melakukan Implementasi Sistem Informasi Penugasan PROLAP.
4. Untuk melakukan pengujian Sistem Informasi Penugasan PROLAP.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi kegunaan akademis dan kegunaan praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut ini.

1.4.1 Kegunaan Akademis:

a. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan informasi bagi pengembangan ilmu Sistem Informasi.

b. Bagi Peneliti Lain

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan khususnya tentang suatu aplikasi yang memiliki nilai mutu dan kegunaan.

c. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan di bidang pembuatan program aplikasi penugasan pegawai dan meningkatkan pengetahuan sekaligus memahami pentingnya teori yang didapat dalam perkuliahan serta dapat mengaplikasikan teori tersebut ke dalam dunia pekerjaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini diantaranya :

a) Bagi BPKP

Dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran dan rekomendasi dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai serta mewujudkan visi dan misi BPKP.

b) Bagi PROLAP

Diharapkan dapat bermanfaat didalam membantu PROLAP dalam mengelola dan mengatur data pelaksanaan tugas serta menghasilkan suatu sistem yang lebih baik.

1.5 Batasan Masalah

Luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada, serta keterbatasan waktu dan pengetahuan supaya pembahasan masalah lebih terfokus dan spesifik maka dibutuhkan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Sistem ini membahas mengenai pengolahan data pelaksanaan tugas.
2. Data pelaksanaan tugas meliputi data pegawai,data penugasan,data akomodasi penugasan.
3. Sistem ini tidak membahas proses pemberian tugas baik dari kantor pusat ataupun departemen lain sebatas hanya membahas proses pelaksanaan tugas.

1.6 Lokasi dan Waktu Penetian

Lokasi:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat(BPKP).

Alamat:

Jalan Raya Cibeureum NO.50 Bandung.Telephon(022)-6075108 kode pos 40215

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

Tabel 1

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2012											
		Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi												
2	Wawancara												
3	Mengidentifikasi kebutuhan												
4	Merancang sistem												
5	Membuat program												
6	Menguji program												